

## PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Asbi Amin\*)

*Dosen Akuntansi STIEM Bongaya Makassar*

***Abstract.** This research aims to empirically examine the effect of regional financial statement presentation and accessibility of financial statements for accountability in financial management. The research was conducted in Makassar district, for two months. The sampling method used is proportionate stratified random sampling; the sample is then determined by 32 managers district and 32 financial staff of SKPD. Research applies for quantitative approaches. For this research the data analyzed using multiple linear regression with tools statistical program, after test the classical assumptions are met. The results of this research show that the presentation of the financial statements and the accessibility of the area of financial reporting partial or jointly positive effect on accountability in financial management.*

***Keywords:** financial reports, accessibility, accountability*

***Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan untuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Makassar, selama dua bulan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah proporsional stratified random sampling; sampel ini kemudian ditentukan oleh 32 manajer distrik dan 32 staf keuangan SKPD. Penelitian berlaku untuk pendekatan kuantitatif. Untuk penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda dengan alat program statistik, setelah uji asumsi klasik terpenuhi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas bidang laporan keuangan efek parsial atau bersama-sama positif pada akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.*

***Kata kunci:** laporan keuangan, aksesibilitas, accountability*

### PENDAHULUAN

Sejak Indonesia mengalami perubahan bentuk pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi yang ditandai dengan berlakunya otonomi daerah, pemerintah daerah pada tingkat kabupaten/kota dituntut dapat melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. (Mardiasmo, 2009).

Akuntabilitas sektor publik berhubungan dengan praktik transparansi dan

pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik. Salah satu informasi yang harus disediakan oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat adalah informasi keuangan yang relevan, jujur, dan terbuka dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan

terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Nordiawan, 2010).

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2006). Kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan merupakan aksesibilitas laporan keuangan. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2009).

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### **Tujuan Penelitian**

Mengetahui bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2009).

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005) menyebutkan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, dengan: 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan; 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Komponen pelaporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan keuangan.

Komponen pelaporan keuangan merupakan satu set laporan, terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (3) Neraca; (4) Laporan Operasional; (5) Laporan Arus Kas; (6) Laporan Perubahan Ekuitas; (7) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas

pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

Entitas pelaporan menyajikan informasi untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas dana.

Menurut Diamond (2002), informasi keuangan di dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat yaitu: (1) meningkatkan akuntabilitas para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) untuk tidak saja bertanggung jawab pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang dikelola; (2) meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah asset yang signifikan dan utang. Pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. (3) memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban; (4) Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

### **Aksesibilitas Laporan Keuangan**

Aksesibilitas dalam perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Rohman, 2009). Di sisi lain, Mulyana (2006) mengemukakan bahwa aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009), laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability dan stewardship*). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002). Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas jika pemerintah daerah terus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara memfasilitasi berbagai pihak yang berkepentingan agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini tersedia di berbagai media, seperti surat kabar, majalah, stasiun televisi, dan internet.

### **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan**

## Daerah

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.589/IX/6/Y/99 dalam Sitompul (2003), akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemberlakuan undang-undang otonomi daerah harus dapat meningkatkan daya inovatif dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan laporan pertanggung jawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas kepada DPRD maupun masyarakat luas.

Osborne (1992) dalam Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain, apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai, dan lain sebagainya. Konsep pelayanan ini dalam akuntabilitas belum memadai, maka harus diikuti dengan jiwa *eterpreneurship* pada pihak-pihak yang melaksanakan akuntabilitas.

Katz (2004) menyatakan bahwa transparansi merupakan proses demokrasi yang esensial di mana setiap warga negara dapat melihat secara terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka daripada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan. Jiwa dari sistem ini adalah kemampuan

dari setiap warga negara untuk memperoleh informasi melalui akuntabilitas pejabat pemerintah atas kegiatan yang mereka lakukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan bahwa komponen yang harus terdapat dalam suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi; Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

## Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: penyajian laporan keuangan daerah dan aksebilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## Metode Penelitian

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini bersifat survei dengan pendekatan kuantitatif, yaitu menganalisis fakta dan data-data yang menunjang keterangan yang diperlukan untuk mendukung pembahasan penelitian dalam memecahkan dan menjawab pokok permasalahan yang diajukan. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui jawaban responden dari kuesioner (daftar pernyataan).

### Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah kepala satuan kerja (SKPD) selaku pengguna anggaran, dan pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD), berjumlah 64 orang dari 32 SKPD yang terkait dengan penyusunan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Karena jumlah populasi dalam penelitian

ini kurang dari 100 responden, maka metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode sensus, yaitu penyebaran kuesioner dilakukan pada semua populasi. Sehingga semua populasi menjadi sampel dalam penelitian ini.

### Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (*Multiple Regression Analysis*) digunakan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksebilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Makassar. Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 22.00. Sesuai dengan permasalahan, tujuan, kerangka konsep dan hipotesis dalam penelitian ini, selanjutnya dikembangkan model analisis berikut ini:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots (1)$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1 - \beta_2$  = Koefisien Regresi

X1 = Penyajian laporan keuangan daerah

X2 = Aksebilitas laporan keuangan daerah

e = Error ( Kesalahan Residual )

### Hasil Penelitian

#### Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah.

Untuk menguji sejauhmana pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksebilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah digunakan analisis statistik secara simultan. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik F. Hal ini dilakukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap Y secara bersama-sama (simultan).

Untuk menguji persamaan regresi linear berganda dapat digunakan tabel analisis varians (ANOVA), yaitu :

- Apabila F Hitung > F Tabel maka  $H_0$  Ditolak
- Apabila F Hitung < F Tabel maka  $H_0$  Diterima

Dimana  $V1 = k$  dan  $V2 = n-k-1$  dan derajat bebas kekeliruan 5 % atau ( $\alpha = 0,05$ ), maka  $H_0$  dapat diterima.

Dengan menggunakan software SPSS 22.00 diperoleh ANOVA untuk menguji pengaruh simultan antara variabel dependen terhadap variabel independen sebagai berikut :

Tabel 1. Koefisien Regresi Secara Simultan

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,736	2	1,368	20,338	,000 <sup>b</sup>
	Residual	4,104	61	,067		
	Total	6,840	63			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sesuai hasil analisis regresi ANOVA (*Analysis of Variant*) dapat dilihat F-hitung = 20,338 sedangkan F-

tabel yaitu 3,148 ( $df1 = 2$ ;  $df2 = 61$ ;  $\alpha = 0,05$ ) atau pada taraf nyata 5%. Tampak bahwa F-hitung > F-tabel, maka dapat

disimpulkan bahwa hiptesis diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksebilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah Kota Makassar. Hasil empiris ini menunjukkan bahwa dengan menyajikan laporan keuangan daerah dan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah bagi para pengguna

temyata akan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan uji t, pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hasil Uji parsial dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,560	,274		9,342	,000
X1	,263	,060	,439	4,403	,000
X2	,175	,042	,413	4,145	,000

a. Dependent Variable: Y

1. Pengaruh Penyajian Laporan keuangan daerah (X1) Terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y).

Hipotesis pertama menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai t-hitung  $X1 = 4,403$  dan t-tabel = 1,670 serta signifikansi = 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel, yang artinya hipotesis diterima, secara parsial penyajian laporan keuangan pemerintah Kota Makassar berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan. Hal ini juga berarti, dengan meningkatnya penyajian laporan keuangan daerah akan berimplikasi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan

menciptakan akuntabilitas (Nordiawan, 2010). Penyajian laporan keuangan yang baik adalah salah satu faktor untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diterima umum. Pengungkapan atas laporan keuangan merupakan elemen penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Mulyana (2006) yang menyatakan bahwa salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah secara lengkap dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan.

2. Pengaruh Akseibilitas laporan keuangan daerah (X2) Terhadap Kualitas Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y).

Hipotesis kedua menyatakan bahwa akseibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai t-hitung  $X1 = 4,145$  dan t-tabel = 1,670 serta signifikansi = 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel, yang artinya hipotesis diterima. Untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan kepada masyarakat dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah. Selain menyajikan laporan keuangan, hal lain yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan akses laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang maksimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Mulyana (2006) yang meneliti tentang pengaruh penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, mencerminkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan akseibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### Saran

Disarankan agar penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan variabel lain yang mempunyai pengaruh kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Penelitian ini terbatas pada penentuan pemilihan responden yang digunakan sehingga penelitian mendatang dapat memperluas sampel penelitian.

### DAFTAR RUJUKAN

- Achmat Badjuri. 2011. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit Auditor Independen Pada KAP di Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Nopember 2011. Vol.3 No. 2, Hal : 183-197.
- Diamond Jack. 2002. "Performance Budgeting-Is Accrual Accounting Required?". *IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department*.
- Ghozali Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi 5. BP: Universitas Diponegoro, Semarang.
- Governmental Accounting Standard Board, 1998, *Governmental Accounting and Financial Reporting Standards*. GASB, Norwalk, Conn.
- Katz, Ellen. 2004. *Transparency in Government- How American Citizens Influence Public Policy*, *Journal of Accountancy*. Juni 2004, hal. 1-2
- LAN. 2000. *Akuntabilitas dan GoodGovernance*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Mulyana Budi. 2006. "Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah". *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol.2 No. 1, Mei 2006.
- Nasution, Saufi Iqbal. 2009. *Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD terhadap Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara.
- Nordiawan Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rochman Abdul. 2009. "Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol. 9 No. 1. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sugjono. 2010. *Metoda Penelitian Bisnis*. Cetakan kesembilan. Bandung: CV Alfabeta.